

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian ini difokuskan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Pemilihan sektor energi dilatarbelakangi oleh karakteristiknya yang kompleks, baik dari sisi struktur permodalan maupun regulasi, serta perannya yang strategis dalam perekonomian nasional. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak dan royalti, serta memiliki kecenderungan tinggi terhadap praktik perencanaan pajak karena struktur operasional dan keuangan yang berskala besar (Saputri & Nuswandari, 2024; Islam & Hashim, 2023).

Penelitian ini menyoroti peran tata kelola perusahaan, khususnya komite audit, dalam mencegah praktik penghindaran pajak. Atribut komite audit yang dianalisis meliputi ukuran komite audit (jumlah anggota) dan frekuensi rapat (jumlah pertemuan tahunan), yang mencerminkan kapasitas struktural dan intensitas pengawasan. Selain itu, independensi komite audit digunakan sebagai variabel moderasi, diukur berdasarkan proporsi anggota independen terhadap total anggota komite.

Adapun penghindaran pajak perusahaan diukur menggunakan *Current Effective Tax Rate* (CETR), yaitu rasio antara beban pajak kini dengan laba sebelum pajak. Beberapa variabel kontrol juga digunakan untuk meningkatkan akurasi

model, yaitu ukuran perusahaan (logaritma natural dari total aset), profitabilitas (ROA), dan *leverage* (rasio utang terhadap aset).

Berdasarkan kriteria *purposive sampling* yang telah ditetapkan, sebanyak 44 perusahaan sektor energi memenuhi syarat sebagai sampel penelitian ini, sebagaimana ditampilkan dalam tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Hasil Pemilihan Sampel

No	Syarat dan Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.	90
2	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode 2021-2023 secara berturut-turut.	(28)
3	Perusahaan memiliki laba sebelum pajak negatif.	(18)
Total Sampel		44
Total Observasi (44 x 3)		132

4.2. Hasil Analisis Data

Bagian ini menyajikan hasil analisis data yang diperoleh dari pengolahan terhadap 44 perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2023. Analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis H_1 hingga H_4 yang telah dirumuskan dalam bab II. Seluruh proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak STATA 14. Hasil analisis disusun secara sistematis dan disajikan pada subbab-subbab berikutnya.

4.2.1. Hasil Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif untuk seluruh variabel penelitian disajikan pada tabel 4.2. Statistik deskriptif ini memberikan gambaran umum mengenai

karakteristik data, yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel pada sampel perusahaan sektor energi selama periode 2021-2023.

Tabel 4. 2
Hasil Statistik Deskriptif

<i>Variable</i>	<i>Obs</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>
CETR	132	0,2575	0,2420	0,0030	1,8877
ACS	132	3,25	0,6921	2	7
ACM	132	8,4621	9,1061	0	60
ACI	132	0,9253	0,1795	0,3333	1,0000
FSZ	132	17947,96	30521,38	3,113102	160074,1
ROA	132	11,9462	13,9410	-5,81	61,76
LEV	132	0,4582	0,2403	0,0554	2,0858

Sumber: Data diolah menggunakan STATA 14, 2025

Tabel 4. 3
Hasil Distribusi Frekuensi ACS

<i>ACS</i>	<i>Freq.</i>	<i>Percent</i>	<i>Cum.</i>
2	2	1,52	1,52
3	107	81,06	82,58
4	15	11,36	93,94
5	5	3,79	97,73
6	2	1,52	99,24
7	1	0,76	100,00
Total	132	100,00	

Keterangan:

CETR : *Current Effective Tax Rate*

ACS : *Audit Committee Size*

ACM : *Audit Committee Meeting*

ACI : *Audit Committee Independence*

FSZ : *Firm Size*

ROA : *Return on Assets*

LEV : *Leverage*

Berdasarkan tabel 4.2, variabel penghindaran pajak, yang diukur menggunakan CETR, menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,2575, dengan nilai minimum 0,0030 dan maksimum 1,8877. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sektor energi membayar sekitar 25,75% dari laba sebelum pajak yang dilaporkan, namun terdapat perusahaan yang hampir tidak membayar pajak dalam satu tahun dan bahkan ada yang membayar pajak melebihi laba kena pajaknya, kemungkinan disebabkan oleh koreksi fiskal atau pembayaran pajak dari periode sebelumnya. Standar deviasi CETR sebesar 0,2420 menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antar perusahaan dalam praktik penghindaran pajak, mulai dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak secara agresif hingga perusahaan yang relatif patuh dalam membayar pajak.

Selanjutnya, variabel ACS memiliki nilai rata-rata sebesar 3,25 anggota, dapat dilihat pada tabel 4.3, jumlah minimum 2 orang dan maksimum 7 orang. Rata-rata ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki jumlah anggota komite audit mendekati ketentuan minimum 3 anggota sesuai POJK No. 55/POJK.04/2015. Standar deviasi sebesar 0,6921 mencerminkan variasi yang kecil antar perusahaan dalam jumlah anggota komite audit, menunjukkan bahwa struktur pengawasan internal relatif seragam pada perusahaan sektor energi, dengan sebagian besar perusahaan memiliki 3 hingga 4 anggota dalam komite auditnya.

Pada variabel ACM, menunjukkan adanya variasi yang sangat besar antar perusahaan. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa frekuensi rapat minimum adalah 0 kali

rapat dan maksimum mencapai 60 kali rapat dalam satu tahun. Nilai rata-rata sebesar 8,4621 kali rapat per tahun menunjukkan bahwa secara umum komite audit melaksanakan rapat sekitar 8 kali dalam satu tahun. Namun, standar deviasi yang tinggi, yaitu sebesar 9,1061, menunjukkan adanya perusahaan yang sangat jarang melaksanakan rapat hingga perusahaan yang sangat rutin melaksanakan rapat, tergantung pada kompleksitas bisnis dan kondisi internal perusahaan. Tidak adanya rapat di salah satu perusahaan disebabkan oleh faktor struktural. Berdasarkan dokumen laporan tahunan PT Semacom Integrated Tbk tahun 2021, komite audit di perusahaan tersebut baru efektif menjabat pada 12 Agustus 2021, setelah perusahaan resmi menjadi perusahaan publik. Sebelum periode tersebut, tidak ada penjelasan terkait keberadaan komite audit karena memang perusahaan belum berstatus publik dan komite audit belum dibentuk. Akibatnya, hingga akhir tahun 2021, komite audit belum melaksanakan aktivitas termasuk penyelenggaraan rapat. Sementara itu, adanya perusahaan yang menyelenggarakan rapat hingga 60 kali dalam setahun menunjukkan penerapan pengawasan yang sangat intensif. Tingginya frekuensi rapat ini umumnya terjadi pada perusahaan dengan aktivitas bisnis yang kompleks dan tingkat risiko yang tinggi. Dalam laporan tahunan perusahaan terkait, dijelaskan bahwa rapat-rapat komite audit tersebut digunakan untuk membahas evaluasi laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pemantauan kepatuhan terhadap regulasi, audit internal maupun eksternal, serta pengawasan atas implementasi prinsip tata kelola perusahaan (CGC). Oleh karena itu, jumlah rapat yang tinggi mencerminkan upaya perusahaan dalam memperkuat pengawasan internal secara berkala.

Variabel ACI menunjukkan proporsi anggota independen dalam komite audit. Nilai rata-rata sebesar 0,9253 atau 92,53% menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan sektor energi memiliki komite audit dengan proporsi anggota independen yang sangat tinggi. Nilai minimum 33,33% dan maksimum 100% menunjukkan bahwa sebagian perusahaan hanya memenuhi ketentuan minimum independensi, sedangkan sebagian besar lainnya telah mengutamakan independensi penuh dalam komposisi komite audit. Standar deviasi sebesar 0,1795 menunjukkan bahwa variasi proporsi anggota independen antar perusahaan tidak terlalu besar.

Sementara itu, variabel FSZ, yang diukur berdasarkan total aset perusahaan dalam satuan miliar rupiah, menunjukkan bahwa nilai rata-rata total aset dari 132 observasi adalah sebesar Rp17.947,96 miliar atau sekitar Rp17,95 triliun. Nilai minimum sebesar Rp3,11 miliar mencerminkan keberadaan perusahaan kecil dalam sektor energi, sedangkan nilai maksimum sebesar Rp160.074,1 miliar atau sekitar Rp160,07 triliun mengindikasikan keberadaan perusahaan dengan skala bisnis yang sangat besar. Standar deviasi sebesar Rp30.521,38 miliar menunjukkan adanya variasi yang cukup tinggi dalam jumlah total aset antar perusahaan. Temuan ini memperkuat fakta bahwa sektor energi di Indonesia terdiri atas perusahaan dengan skala aset yang sangat beragam, mulai dari skala kecil hingga perusahaan besar dengan aset di atas Rp160 triliun.

Variabel profitabilitas, yang diukur dengan ROA, menunjukkan rata-rata sebesar 11,95% dengan nilai minimum -5,81% dan maksimum sebesar 61,76%. Rata-rata ini menunjukkan bahwa Perusahaan dalam sektor energi secara umum mampu menghasilkan laba bersih sebesar 11,95% dari total asetnya. Nilai minimum

negatif menunjukkan adanya Perusahaan yang mengalami kerugian, sedangkan nilai maksimum yang tinggi mencerminkan adanya perusahaan yang memiliki efisiensi pengelolaan aset yang sangat baik. Standar deviasi sebesar 13,94% menunjukkan adanya variasi yang besar antar perusahaan dalam menghasilkan laba.

Terakhir, variabel *leverage*, yang menggambarkan proporsi penggunaan utang terhadap total aset perusahaan, menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,4582 atau 45,82%. Ini menunjukkan bahwa secara rata-rata hampir setengah aset perusahaan sektor energi dibiayai menggunakan utang. Nilai minimum *leverage* adalah 0,0554, menunjukkan perusahaan dengan utang sangat rendah, sedangkan nilai maksimum mencapai 2,0858, yang artinya ada perusahaan yang total utangnya lebih besar dari aset yang dimiliki. Standar deviasi sebesar 0,2403 menunjukkan adanya variasi struktur modal antar perusahaan, dari yang konservatif hingga yang sangat agresif dalam penggunaan utang.

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif dalam tabel 4.2 menunjukkan bahwa meskipun terdapat keseragaman dalam struktur komite audit, sektor energi di Indonesia menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam hal ukuran perusahaan, profitabilitas, struktur modal, dan strategi perpajakan.

Selain statistik deskriptif, tabel 4.3 menunjukkan hasil distribusi frekuensi ACS. Dari total 132 observasi, mayoritas perusahaan memiliki jumlah anggota komite audit sebanyak 3 orang, yaitu sebanyak 107 perusahaan atau 81,06% dari total sampel. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sektor energi hanya memenuhi jumlah minimum anggota komite audit yang disyaratkan oleh

regulasi. Selain itu, terdapat 15 perusahaan (11,36%) dengan 4 anggota komite audit, 5 perusahaan (3,79%) dengan 5 anggota, 2 perusahaan (1,52%) dengan 6 anggota, dan hanya 1 perusahaan (0,76%) yang memiliki komite audit beranggotakan 7 orang. Sementara itu, terdapat 2 perusahaan (1,52%) yang hanya memiliki 2 anggota dalam komite auditnya. Temuan distribusi frekuensi ini menunjukkan bahwa struktur pengawasan internal dalam perusahaan energi cenderung seragam dan sebagian besar belum menambah jumlah anggota komite audit di atas jumlah minimum yang diwajibkan oleh peraturan.

4.2.2. Hasil Uji korelasi

Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, baik arah maupun kekuatannya. Dalam penelitian ini, digunakan uji Pearson untuk mengukur hubungan antara variabel independen, variabel kontrol, dan variabel dependen. Nilai koefisien korelasi (r) berkisar antara -1 sampai dengan +1, di mana nilai positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan. Korelasi dianggap signifikan apabila nilai p -value < 0,05. Hasil uji korelasi antar variabel disajikan pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4. 4
Hasil Uji Korelasi Pearson

Variabel 1	Variabel 2	Koefisien Korelasi (r)	Sig. (p-value)	Keterangan
CETR	ACS	0,0681	0,4381	Tidak signifikan
CETR	ACM	-0,1228	0,1605	Tidak signifikan
CETR	ACI	0,0339	0,6996	Tidak signifikan
CETR	FSZ	0,0220	0,8023	Tidak signifikan
CETR	ROA	-0,1126	0,1986	Tidak

				signifikan
CETR	LEV	0,5573	0,0000	Signifikan positif

Sumber: Data diolah menggunakan STATA 14, 2025

Keterangan:

CETR : *Current Effective Tax Rate*

ACS : *Audit Committee Size*

ACM : *Audit Committee Meeting*

ACI : *Audit Committee Independence*

FSZ : *Firm Size*

ROA : *Return on Assets*

LEV : *Leverage*

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa sebagian besar variabel tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik dengan variabel penghindaran pajak. Variabel ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, independensi komite audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas masing-masing memiliki nilai p-value di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel-variabel tersebut dengan penghindaran pajak pada tingkat kepercayaan 95%.

Namun demikian, terdapat satu variabel yang menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik terhadap penghindaran pajak, yaitu *leverage*. Variabel *leverage* menunjukkan hubungan yang signifikan positif dengan penghindaran pajak, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,5573 dan o-value sebesar 0,0000. Hubungan ini signifikan pada tingkat kepercayaan 99% ($p < 0,01$), yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi proporsi utang perusahaan, semakin besar

pula kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung berusaha menekan beban fiskal guna menjaga arus kas dan memenuhi kewajiban utangnya.

Nilai p-value dalam analisis korelasi ini menunjukkan signifikansi statistik, sedangkan arah hubungan ditentukan oleh nilai koefisien korelasi (r). Artinya, baik hubungan negatif maupun hubungan positif dapat sama-sama signifikan tergantung pada kekuatan dan arah hubungan antar variabel.

Uji korelasi ini memberikan gambaran awal mengenai potensi hubungan antara variabel dalam penelitian. Temuan ini akan diuji lebih lanjut secara mendalam pada tahap regresi, untuk mengetahui pengaruh parsial dan interaksi antar variabel sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

4.2.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

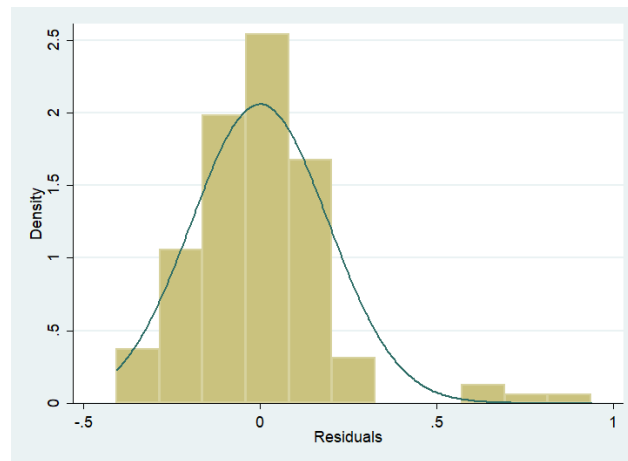
Pengujian asumsi klasik merupakan tahapan awal yang perlu dilakukan sebelum menjalankan analisis regresi linier berganda, guna memastikan keandalan model yang digunakan. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, yang disajikan secara rinci pada subbab 4.2.3.1 hingga 4.2.3.4.

4.2.3.1. Hasil Uji Normalitas

Gambar 4.1 menunjukkan histogram residual yang memperlihatkan penyebaran residual menyerupai distribusi normal, dengan bentuk kurva lonceng. Meskipun demikian, terdapat sedikit ketidakseimbangan di sisi kanan grafik, di mana terdapat beberapa nilai residual yang cukup besar. Secara umum, penyebaran residual dapat dikatakan mendekati normal. Sementara itu, gambar 4.2, yaitu

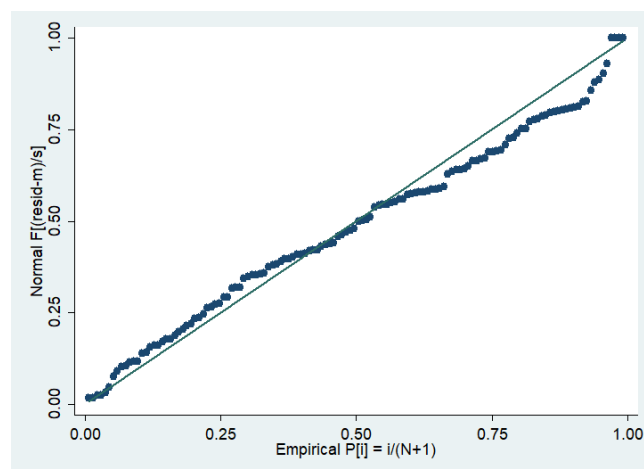
normal P-Plot, menunjukkan bahwa sebagian besar titik residual berada di sekitar garis diagonal, yang menandakan pola distribusi residual yang relatif normal. Namun, terdapat penyimpangan pada bagian ujung bawah dan atas garis, yang menunjukkan bahwa residual tidak sepenuhnya mengikuti distribusi normal secara sempurna.

Gambar 4. 1
Grafik Histogram



Sumber: Data diolah menggunakan STATA 14, 2025

Gambar 4. 2
Normal P-Plot



Sumber: Data diolah menggunakan STATA 14, 2025

Selain analisis pada kedua grafik, dilakukan juga pengujian formal secara statistik untuk mengonfirmasi apakah data residual berdistribusi normal. Uji *Shapiro-Wilk* digunakan karena sesuai untuk jumlah sampel kecil hingga menengah ($n < 2000$). Hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel 4.5 menunjukkan nilai statistik $W = 0,9023$ dengan $p\text{-value} = 0,0000$. Karena $p\text{-value} < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik, residual tidak berdistribusi normal.

Tabel 4. 5
Hasil Uji Normalitas *Shapiro-Wilk*

Uji Statistik	Nilai	Keterangan
<i>Shapiro-Wilk</i>	0,9023	Nilai statistik uji normalitas
p-value	0,0000	$< 0,05 \rightarrow$ tidak normal

Sumber: Data diolah menggunakan STATA 14, 2025

Berdasarkan hasil uji grafik maupun pengujian statistik formal, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas residual dalam model ini tidak terpenuhi secara sempurna. Peneliti telah melakukan proses *winsorize* pada data untuk mengurangi pengaruh nilai ekstrim, namun hasil pengujian menunjukkan bahwa distribusi residual tetap tidak memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *robust standard error* ($vce(robust)$) dalam analisis regresi, untuk mengatasi potensi bias akibat pelanggaran asumsi normalitas maupun heteroskedastisitas, sehingga hasil estimasi tetap dapat diinterpretasikan secara valid (Wooldridge, 2020).

4.2.3.2. Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 4.6, seluruh variabel independen dalam model memiliki nilai VIF di bawah 10, dengan nilai tertinggi sebesar 1,32 dan nilai rata-rata (mean VIF) sebesar 1,15. Selain itu, nilai *tolerance* $1/VIF$ seluruh variabel berada di atas

0,10 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari permasalahan multikolinearitas, sehingga estimasi parameter dalam model ini dapat dilakukan secara lebih akurat dan andal.

Tabel 4. 6
Hasil Uji Multikolinearitas (VIF)

<i>Variable</i>	VIF	<i>Tolerance</i>
ACM	1,32	0,7554
ACS	1,31	0,7606
ROA	1,04	0,9571
LEV	1,04	0,9588
FSZ	1,01	0,9852
Mean VIF	1,15	

Sumber: Data diolah menggunakan STATA 14, 2025

Keterangan:

ACM : *Audit Committee Meeting*

ACS : *Audit Committee Size*

ROA : *Return on Assets*

LEV : *Leverage*

FSZ : *Firm Size*

4.2.3.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat ketidaksamaan varian residual di antara pengamatan. Model regresi yang ideal seharusnya memenuhi asumsi homoskedastisitas, yaitu kondisi di mana varians residual bersifat konstan atau seragam pada setiap nilai prediksi. Pelanggaran terhadap asumsi ini disebut heteroskedastisitas, yang dapat menyebabkan standar error menjadi bias.

Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji *Breusch-Pagan*, sebagaimana disajikan tabel 4.7. hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi mengalami heteroskedastisitas, sehingga salah satu asumsi klasik dalam regresi linear tidak terpenuhi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, analisis regresi dalam penelitian ini dilanjutkan dengan menggunakan metode *robust standard error* ($vce(robust)$), guna mengoreksi bias pada standar error akibat adanya heteroskedastisitas. Dengan demikian, hasil estimasi model tetap dapat diinterpretasikan secara valid dan dapat diandalkan.

Tabel 4. 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas (*Breusch-Pagan*)

Statsitik Uji	Nilai	Keterangan
Chi-square	105,65	Nilai statistik uji BP
df	1	Derajat kebebasan
p-value	0,0000	< 0,05 → Terdapat heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah menggunakan STATA 14, 2025

4.2.3.4. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara residual saat ini dengan residual periode sebelumnya. Jika residual saling berkaitan, maka model regresi mengalami autokorelasi, yang dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi kurang akurat.

Pengujian autokorelasi dilakukan secara manual, yaitu dengan meregresikan residual hasil regresi linear berganda terhadap residual lag (residual tertinggal satu periode). Uji ini dilakukan baik untuk model pertama maupun model kedua, karena

masing-masing model memiliki residual berbeda.

Pada model pertama, diperoleh nilai $\text{Prob} > F$ sebesar 0,1251, sedangkan pada model kedua, diperoleh nilai $\text{Prob} > F$ sebesar 0,1417. Kedua nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik model pertama maupun model kedua tidak mengalami autokorelasi secara signifikan.

Meskipun tidak ditemukan autokorelasi yang signifikan, regresi linear berganda tetap dijalankan menggunakan *robust standard error* untuk mengatasi potensi heteroskedastisitas, ketidaknormalan residual, serta kemungkinan adanya autokorelasi lemah yang tidak terdeteksi secara statistik. Penggunaan *robust standard error* dilakukan agar hasil regresi tetap valid dan dapat diinterpretasikan secara andal.

Hasil uji autokorelasi untuk kedua model disajikan pada tabel 4.8, yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari autokorelasi secara signifikan.

Tabel 4. 8
Hasil Uji Autokorelasi Manual

Model	Metode Pengujian	Prob > F	Keterangan
1	Regresi Residual terhadap Lag	0,1251	Tidak terdapat autokorelasi secara signifikan.
2	Regresi Residual terhadap Lag	0,1417	Tidak terdapat autokorelasi secara signifikan.

Sumber: Data diolah menggunakan STATA 14, 2025

4.2.4. Hasil Uji Model

Setelah model regresi dibangun dan seluruh asumsi klasik dinyatakan

terpenuhi, tahap selanjutnya adalah menguji kelayakan model secara menyeluruh. Uji model bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini, evaluasi model dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu uji koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) dan uji statistik F. Hasil dari masing-masing pengujian tersebut akan dijelaskan pada subbagian berikut.

4.2.4.1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Square*)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana variasi penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model regresi linear berganda. Nilai koefisien determinasi yang digunakan adalah *Adjusted R-Square*, karena ukuran ini memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model dan memberikan gambaran yang lebih akurat terkait kemampuan model dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil yang disajikan pada tabel 4.9, nilai *Adjusted R-Square* untuk model 1 adalah sebesar 0,3343, yang berarti bahwa sekitar 33,43% variasi penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*. Sementara itu, *Adjusted R-Square* pada model 2 sebesar 0,3289, yang menunjukkan bahwa sekitar 32,89% variasi penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model, termasuk independensi komite audit serta dua variabel interaksi, di samping variabel-variabel yang digunakan pada model 1.

Tabel 4.9 juga mencantumkan nilai *R-Square* masing-masing model sebagai pelengkap informasi tentang goodness-of-fit model. Nilai *Adjusted R-Square*

diambil dari hasil regresi tanpa menggunakan perintah `vce(robust)`, karena STATA tidak menampilkan nilai tersebut dalam regresi dengan *robust standard error*. Meskipun demikian, seluruh pengujian regresi tetap dilakukan dengan *robust standard error* untuk memperoleh hasil estimasi yang valid secara statistik dan mengatasi potensi heteroskedastisitas maupun autokorelasi dalam model.

Tabel 4. 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 1 dan Model 2

Statistik	Model 1	Model 2
<i>R-Square</i>	0,3597	0,3699
<i>Adjusted R-Square</i>	0,3343	0,3289

Sumber: Data diolah menggunakan STATA 14, 2025

4.2.4.2. Hasil Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model regresi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Suatu model dinyatakan layak digunakan apabila nilai p-value dari uji F $< 0,05$.

Berdasarkan hasil regresi yang disajikan pada tabel 4.10, diketahui bahwa model 1 menghasilkan nilai F-statistik sebesar 14,16 dengan p-value sebesar 0,0000, sedangkan model 2 menghasilkan nilai F-statistik sebesar 9,02 dengan p-value yang juga sebesar 0,0000. Karena kedua nilai $p < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam masing-masing model secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, kedua model regresi dinyatakan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 4. 10
Hasil Uji Statistik F (Model 1 dan Model 2)

Statistik	Model 1	Model 1
-----------	---------	---------

F-Statistik	14,16	9,02
p-value	0,0000	0,0000

Sumber: Data diolah menggunakan STATA 14, 2025

4.2.5. Hasil Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji t, yang bertujuan menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

4.2.5.1. Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan terhadap dua model regresi, yaitu:

1. Model pertama (regresi tanpa moderasi), untuk menguji pengaruh langsung ukuran dan frekuensi rapat komite audit terhadap penghindaran pajak.
2. Model kedua (*Moderated Regression Analysis*), untuk menguji apakah independensi komite audit dapat memoderasi pengaruh ukuran dan frekuensi rapat terhadap penghindaran pajak.

Kedua model diuji menggunakan pendekatan *robust standard error* untuk mengatasi pelanggaran asumsi klasik. Hasil pengujian masing-masing model dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4. 11
Model Pertama (Tanpa Moderasi) dengan *Robust Standard Error*

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Stat	p-value
ACS	0,0650	0,0376	1,73	0,086
ACM	-0,0064	0,0019	-3,43	0,001
FSZ	0,0006	0,0038	0,17	0,863
ROA	-0,0002	0,0010	-0,23	0,820
LEV	0,5706	0,1771	3,22	0,002
<i>Constant</i>	-0,1722	0,1280	-1,35	0,181

Sumber: Data diolah menggunakan STATA 14, 2025

Keterangan:

ACS	: <i>Audit Committee Size</i>
ACM	: <i>Audit Committee Meeting</i>
FSZ	: <i>Firm Size</i>
ROA	: <i>Return on Assets</i>
LEV	: <i>Leverage</i>

Model pertama digunakan untuk menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2, yaitu mengenai pengaruh ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 4.11, hasil uji t menunjukkan bahwa ukuran komite audit (ACS) memiliki koefisien positif sebesar 0,0650 dengan t-statistik 1,73 dan p-value 0,086. Tanda positif ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran komite audit, semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, karena p-value $> 0,05$, hubungan ini tidak signifikan secara statistik, sehingga hipotesis 1 tidak terdukung. Selain itu, arah hubungan ini tidak sesuai dengan dugaan awal penelitian yang memperkirakan hubungan negatif.

Sementara itu, variabel ACM memiliki koefisien negatif sebesar -0,0064, t-statistik -3,43, dan p-value sebesar 0,001. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa semakin sering komite audit mengadakan rapat, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Hubungan ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan dan signifikan secara statistik 5%, sehingga hipotesis 2 terdukung.

Untuk variabel kontrol, *leverage* menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan koefisien sebesar 0,5706, t-statistik

3,22, dan p-value sebesar 0,002. Artinya, semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, profitabilitas (ROA) memiliki koefisien negatif sebesar -0,0002, t-statistik -0,23, dan p-value 0,820, menunjukkan bahwa profitabilitas yang lebih tinggi cenderung menurunkan tingkat penghindaran pajak, namun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Sedangkan ukuran perusahaan (FSZ) memiliki koefisien positif sebesar 0,0006, tetapi tidak signifikan secara statistik ($p = 0,863$).

Nilai konstanta sebesar -0,1722 menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen dalam model bernilai nol, maka nilai CETR diperkirakan sebesar -0,1722. Namun, karena p-value sebesar 0,181 ($> 0,05$), maka nilai konstanta ini tidak signifikan dan perlu diinterpretasikan dengan hati-hati.

Berdasarkan hasil tersebut, model regresi pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = -0,1722 + 0,0650\text{ACS} - 0,0064\text{ACM} + 0,0006\text{FSZ} - 0,0002\text{ROA} + 0,5706\text{LEV} + \varepsilon$$

Tabel 4. 12
Hasil Uji t Model Kedua *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Stat	p-value
ACS	-0,2982	0,2695	-1,11	0,271
ACM	-0,0013	0,0122	-0,11	0,915
ACI	-1,1707	0,8498	-1,38	0,171
ACS*ACI	0,3785	0,2955	1,28	0,203
ACM*ACI	-0,0083	0,0132	-0,63	0,529
FSZ	0,0020	0,0045	0,45	0,652
ROA	-0,0003	0,0010	-0,36	0,722
LEV	0,5801	0,1785	3,25	0,001
Constant	0,9185	0,8183	1,12	0,264

Sumber: Data diolah menggunakan STATA 14, 2025

Keterangan:

ACS	: <i>Audit Committee Size</i>
ACM	: <i>Audit Committee Meeting</i>
ACI	: <i>Audit Committee Independence</i>
ACS*ACI	:Interaksi antara ukuran komite audit dan independensi
ACM*ACI	:Interaksi antara frekuensi rapat dan independensi komite audit
FSZ	: <i>Firm Size</i>
ROA	: <i>Return on Assets</i>
LEV	: <i>Leverage</i>

Model kedua digunakan untuk menguji hipotesis 3 dan hipotesis 4, yaitu untuk mengetahui apakah independensi komite audit (ACI) mampu memperkuat pengaruh ukuran dan frekuensi rapat komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan tabel 4.12, variabel ACI memiliki koefisien negatif sebesar -1,1707, t-statistik -1,38, dan p-value sebesar 0,171. Arah negatif ini menunjukkan bahwa semakin independen komite audit, semakin kecil kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Namun, karena p-value > 0,05, pengaruh ini tidak signifikan, sehingga ACI tidak terbukti berpengaruh langsung terhadap penghindaran pajak.

Hasil interaksi antara ukuran komite audit dan independensi komite audit (ACS*ACI) menunjukkan koefisien positif sebesar 0,3785, t-statistik 1,28, dan p-value 0,203. Arah positif ini bertentangan dengan dugaan awal, yang mengharapkan arah negatif. Dengan demikian, independensi komite audit tidak memperkuat hubungan negatif antara ukuran komite audit dan penghindaran pajak; justru

interaksi ini cenderung meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik.

Sementara itu, interaksi antara frekuensi rapat komite audit dan independensi komite audit (ACM*ACI) memiliki koefisien negatif sebesar -0,0083, t-statistik -0,63, dan p-value sebesar 0,529. Arah negatif ini sesuai dengan dugaan awal, tetapi interaksi tersebut juga tidak signifikan. Dengan demikian, independensi komite audit tidak terbukti memoderasi hubungan frekuensi rapat komite audit terhadap penghindaran pajak secara signifikan. Secara keseluruhan, baik hipotesis 3 maupun hipotesis 4 tidak didukung secara empiris.

Temuan pada model kedua juga tidak sepenuhnya konsisten dengan model pertama. Dalam model pertama, terdapat dua variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yaitu frekuensi rapat komite audit (ACM) dan *leverage* (LEV). Frekuensi rapat komite audit (ACM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan *leverage* (LEV) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, pada model kedua, hanya *leverage* (LEV) yang tetap menunjukkan pengaruh signifikan.

Dengan demikian, dalam konteks perusahaan sektor energi di Indonesia, pengaruh atribut komite audit, baik secara langsung maupun melalui moderasi independensi, belum menunjukkan efektivitas dalam menekan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, karakteristik keuangan perusahaan, khususnya tingkat *leverage*, tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Adapun bentuk persamaan regresi model kedua adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{CETR} = & 0,9185 - 0,2982\text{ACS} - 0,0013\text{ACM} - 1,1707\text{ACI} + 0,3785\text{ACS}*\text{ACI} \\ & - 0,0083\text{ACM}*\text{ACI} + 0,0020\text{FSZ} - 0,0003\text{ROA} + 0,5801\text{LEV} + \varepsilon \end{aligned}$$

Tabel 4.13 berikut menyajikan ringkasan dari hasil pengujian terhadap keempat hipotesis dalam penelitian ini. Tabel ini memberikan gambaran ringkas mengenai koefisien regresi, nilai t, p-value, serta kesimpulan hasil uji untuk masing-masing hipotesis yang telah dijelaskan.

Tabel 4. 13
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis		Model	Koefisien	t-Stat	p-value	Kesimpulan
H ₁	Ukuran komite audit berpengaruh negatif dengan penghindaran pajak perusahaan	Model 1	0,0650	1,73	0,086	Tidak Didukung
H ₂	Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif dengan penghindaran pajak perusahaan	Model 1	-0,0064	-3,43	0,001	Didukung
H ₃	Independensi komite audit memperkuat hubungan negatif antara ukuran komite audit dan penghindaran pajak perusahaan	Model 2	0,3785	1,28	0,203	Tidak Didukung
H ₄	Independensi komite audit memperkuat hubungan negatif antara frekuensi rapat komite audit dan penghindaran pajak perusahaan	Model 2	-0,0083	-0,63	0,529	Tidak Didukung

Sumber: Data diolah menggunakan STATA 14, 2025

4.3. Interpretasi Hasil

Bagian ini membahas hasil uji hipotesis yang telah diperoleh dari analisis data. Interpretasi dilakukan dengan mengacu pada hasil analisis, teori yang digunakan, serta penelitian terdahulu. Tujuannya adalah untuk melihat kesesuaian antara temuan empiris dengan dasar teori dan bukti sebelumnya.

4.3.1. Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis pertama tidak didukung dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji t, nilai p sebesar 0,322 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Artinya, dalam konteks penelitian ini, jumlah anggota komite audit tidak terbukti memengaruhi penghindaran pajak perusahaan.

Hipotesis ini disusun berdasarkan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit seharusnya memperkuat fungsi pengawasan terhadap manajemen, termasuk dalam membatasi praktik penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung asumsi tersebut.

Salah satu penyebab tidak signifikannya pengaruh ukuran komite audit adalah karena sebagian besar perusahaan hanya memiliki jumlah anggota komite audit sesuai batas minimum yang diatur oleh POJK No. 55/POJK.04/2015. Berdasarkan statistik deskriptif, rata-rata ukuran komite audit adalah 3,25 anggota, dengan jumlah minimum 2 dan maksimum 7, serta 81,06% perusahaan memiliki 3 anggota komite audit. Rendahnya variasi ini mengindikasikan bahwa pembentukan komite audit diduga hanya sebatas pemenuhan regulasi, bukan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, sehingga pengaruhnya terhadap penghindaran pajak tidak terlihat signifikan secara statistik.

Sementara itu, hasil statistik deskriptif pada variabel penghindaran pajak menunjukkan bahwa rata-rata nilai CETR sebesar 0,2575, yang berarti bahwa perusahaan sektor energi dalam penelitian ini membayar pajak sebesar 25,75% dari

laba akuntansi. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan tarif pajak resmi di Indonesia sebesar 22%, yang menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak tergolong rendah karena sebagian besar perusahaan justru membayar pajak di atas tarif standar. Nilai CETR yang tinggi ini dapat dikaitkan dengan karakteristik industri energi. Perusahaan energi tidak hanya dikenakan pajak penghasilan badan, tetapi juga wajib membayar royalti, iuran produksi, dan PNBK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017. Beban-beban tersebut dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini, sehingga mendorong rasio CETR menjadi lebih tinggi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rosyidah *et al.*, (2022) pada perusahaan sektor manufaktur di Indonesia dan Sinambela (2022) pada berbagai sektor, yang menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian Islam dan Hashim (2023) pada sektor bahan bakar dan listrik di Bangladesh, yang menemukan bahwa pengaruh ukuran komite audit terhadap penghindaran pajak tidak signifikan.

Namun, temuan ini tidak dapat diartikan bahwa komite audit tidak memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan. Beberapa studi seperti Munir & Cahyonowati (2024) dan Beasley *et al.* (2000) menegaskan bahwa efektivitas komite audit lebih dipengaruhi oleh kualitas, kompetensi, dan tingkat independensi anggotanya dibandingkan dengan jumlah anggota semata. Oleh karena itu, peningkatan kinerja komite audit perlu diarahkan pada aspek kualitas dan independensi, bukan sekadar memperbesar jumlah anggota.

4.3.2. Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis kedua didukung dalam penelitian ini. Hipotesis ini menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak perusahaan, dan hasil penelitian mendukung prediksi tersebut. Hubungan yang ditemukan berarah negatif dan signifikan secara statistik. Artinya, semakin sering komite audit melakukan rapat, kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak semakin menurun.

Hipotesis ini dikembangkan berdasarkan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), yang memandang frekuensi rapat komite audit sebagai instrumen pengawasan yang penting dalam membatasi perilaku oportunistik manajemen, termasuk penghindaran pajak. Pelaksanaan rapat yang rutin memungkinkan komite audit memantau kebijakan perpajakan perusahaan secara lebih intensif dan mencegah potensi manipulasi pengelolaan laba terkait pajak.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, frekuensi rapat komite audit dalam perusahaan sektor energi memiliki rata-rata 8,46 kali dalam setahun, dengan jumlah minimum 0 rapat dan maksimum 60 rapat. Sebagian besar perusahaan telah melaksanakan rapat secara rutin sepanjang tahun. Perusahaan yang tidak melakukan rapat sama sekali disebabkan oleh komite audit yang baru dibentuk di pertengahan tahun setelah perusahaan menjadi publik. Sedangkan perusahaan yang melakukan rapat hingga 60 kali umumnya memiliki aktivitas bisnis yang kompleks dan risiko operasional yang tinggi sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih

intensif.

Sementara itu, data statistik pada variabel penghindaran pajak menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan sektor energi membayar pajak lebih tinggi dari tarif resmi yang berlaku. Nilai rata-rata CETR sebesar 0,2575 menunjukkan bahwa beban pajak perusahaan mencapai 25,75% dari laba sebelum pajak. Persentase ini melampaui tarif pajak penghasilan badan di Indonesia sebesar 22%, yang menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak di sektor energi relatif terbatas.

Tingkat pembayaran pajak yang tinggi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh aspek pajak penghasilan badan, tetapi juga oleh kewajiban pembayaran royalti, iuran produksi, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017. Seluruh kewajiban tersebut dicatat sebagai beban pajak kini dalam laporan keuangan, sehingga berkontribusi pada tingginya rasio CETR. Selain itu, sifat proyek jangka panjang dalam industri energi menyebabkan fluktuasi laba sebelum pajak yang juga dapat mempengaruhi rasio efektivitas pajak secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Islam dan Hashim (2024), yang menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak di sektor bahan bakar dan listrik. Hal ini memperkuat bukti bahwa pengawasan melalui mekanisme rapat komite audit mampu menekan praktik penghindaran pajak di industri ini.

4.3.3. Pengaruh Moderasi Independensi Komite Audit terhadap Hubungan Ukuran Komite Audit dan Penghindaran Pajak Perusahaan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga tidak didukung dalam

penelitian ini. Berdasarkan hasil uji t, nilai p sebesar 0,151 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa interaksi antara ukuran komite audit dan independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Artinya, independensi komite audit tidak terbukti memoderasi pengaruh ukuran komite audit terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis ini dibangun berdasarkan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), yang menyatakan bahwa keberadaan anggota komite audit independen seharusnya dapat memperkuat fungsi pengawasan, termasuk dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung asumsi tersebut.

Berdasarkan statistik deskriptif, nilai rata-rata independensi komite audit (ACI) adalah 0,9253 atau 92,53%, dengan nilai minimum 33,33% dan maksimum 100%. Mayoritas perusahaan sektor energi memiliki komite audit dengan proporsi anggota independen yang sangat tinggi, namun standar deviasi sebesar 0,1795 menunjukkan variasi yang relatif kecil antarperusahaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan sudah memenuhi atau bahkan melebihi ketentuan minimum independensi komite audit. Meskipun demikian, tingginya proporsi anggota independen tidak serta-merta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap praktik perpajakan, yang mungkin disebabkan oleh faktor kualitas dan kompetensi anggota komite audit yang tidak tercermin hanya dari status independensinya.

Selain itu, hasil statistik deskriptif variabel penghindaran pajak menunjukkan bahwa nilai rata-rata CETR sebesar 0,2575, lebih tinggi dibandingkan tarif pajak

resmi sebesar 22%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor energi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah karena adanya kewajiban tambahan seperti royalti, iuran produksi, dan PNBPN .

Hasil ini konsisten dengan temuan Rahmawati & Lisiantara (2023) dan Marentek & Wokas (2021), yang menunjukkan bahwa meskipun struktur komite audit telah memenuhi ketentuan jumlah anggota dan proporsi independensi, efektivitas pengawasan dalam aspek perpajakan tetap bergantung pada kualitas dan kompetensi anggota komite audit, bukan sekadar status independensinya. Sebaliknya, hasil ini berbeda dengan penelitian Islam dan Hashim (2023) pada sektor energi di Bangladesh, yang menemukan bahwa independensi komite audit mampu memperkuat pengaruh ukuran komite audit dalam menekan penghindaran pajak.

4.3.4. Pengaruh Moderasi Independensi Komite Audit terhadap Hubungan Frekuensi Rapat Komite Audit dan Penghindaran Pajak Perusahaan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa independensi komite audit tidak terbukti memoderasi pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan. Interaksi antara frekuensi rapat dan independensi komite audit tidak menghasilkan hubungan yang signifikan secara statistik. Artinya, keberadaan anggota komite audit yang independen belum mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh frekuensi rapat terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, frekuensi rapat komite audit pada perusahaan sektor energi memiliki rata-rata 8,46 kali rapat per tahun, dengan

jumlah minimum 0 rapat dan maksimum 60 rapat. Standar deviasi sebesar 9,11 menunjukkan adanya variasi yang besar antar perusahaan, mulai dari yang jarang mengadakan rapat hingga yang sangat sering melakukan rapat. Perusahaan yang tidak melakukan rapat sama sekali umumnya merupakan perusahaan yang baru membentuk komite audit di pertengahan tahun setelah IPO, sedangkan perusahaan yang melakukan rapat hingga 60 kali biasanya memiliki aktivitas bisnis yang kompleks dan risiko operasional yang tinggi, sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara teori frekuensi rapat komite audit yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, keberadaan anggota komite audit yang independen ternyata belum cukup untuk memperkuat hubungan tersebut. Dengan kata lain, independensi anggota komite audit tidak secara otomatis membuat rapat menjadi lebih efektif dalam membahas atau membatasi praktik penghindaran pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh rapat yang lebih berfokus pada aspek administratif daripada pengawasan kebijakan perpajakan secara substantif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Alqatan *et al.*, (2025), yang menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit hanya memiliki hubungan yang lemah terhadap praktik agresivitas pajak perusahaan. Selain itu, penelitian Ramadhan dan Kusumastati (2025) juga menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi. Mereka menjelaskan bahwa tingginya jumlah rapat tidak selalu diikuti oleh pembahasan mendalam terkait risiko dan pengawasan pajak, sehingga

rapat yang sering dilaksanakan belum tentu menghasilkan pengawasan yang efektif.

Hasil ini tidak sesuai dengan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), yang mengasumsikan bahwa keberadaan anggota independen dapat memperkuat fungsi pengawasan komite audit. Dalam praktiknya, independensi anggota komite audit belum mampu memperkuat hubungan antara frekuensi rapat dan pengurangan penghindaran pajak sebagaimana yang diharapkan oleh teori tersebut.